PERLAWANAN KOLONIAL DARI ELIT KE RAKYAT: PERAN INDISCHE PARTIJ DAN PKI DALAM SEJARAH PERGERAKAN INDONESIA

Frendy Nasril[1], Fathiah Nur Hasanah[2], Adelya Fasera[3], Mia Novita Sari[4], Raudhatul Hasanah[5], Etmi Hardi[6]

[1,2,3,4,5,6]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : frendynasril18@gmail.com[1], fathiahnurhasanah0702@gmail.com[2], adelyafasera93@gmail.com[3], mianovita61@gmail.com[4], hasanahraudatul43@gmail.com[5], etmihardi@fis.unp.ac.id[6]

ABSTRACT

This article examines the roles of the Indische Partij and the Indonesian Communist Party (PKI) in Indonesia's national movement as forms of anti-colonial resistance spanning from the educated elite to the common people. Using a literature review method, this study reveals that the Indische Partij (1912), founded by the Three Musketeers, pioneered inclusive nationalism and introduced the political identity of "Indonesia," while the ISDV, which transformed into the PKI (1920), built a worker- and peasant-based movement through mass mobilization and political education. Despite facing colonial repression, both organizations left ideological legacies that strengthened the foundations of Indonesia's independence struggle.

Keywords : *Indische Partij, PKI, National Movement, Colonialism, Nationalism*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji peran Indische Partij dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia sebagai wujud perlawanan terhadap kolonialisme dari kalangan elite terpelajar hingga rakyat kecil. Dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa Indische Partij (1912) yang digagas Tiga Serangkai mempelopori nasionalisme inklusif dan memperkenalkan identitas "Indonesia", sementara ISDV yang bertransformasi menjadi PKI (1920) membangun gerakan berbasis buruh dan tani melalui mobilisasi massa dan pendidikan politik. Meskipun keduanya mengalami represi kolonial, warisan ideologis mereka memperkuat fondasi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Kata Kunci : *Indische Partij, PKI, pergerakan nasional, kolonialisme, nasionalisme*

PENDAHULUAN

Awal abad ke-20 merupakan periode penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Kebijakan Politik Etis yang dicanangkan Belanda pada tahun 1901 membuka akses pendidikan bagi sebagian pribumi, sehingga melahirkan golongan cendekiawan yang mulai menyadari ketidakadilan kolonial. Namun, di balik janji kesejahteraan, diskriminasi rasial tetap berlangsung: masyarakat pribumi dan golongan Indo tidak memperoleh hak yang sama dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik dibandingkan orang Belanda. Ketimpangan inilah yang melahirkan gagasan perlawanan politik yang lebih terorganisir.

Dalam konteks tersebut, muncul Indische Partij pada tahun 1912 yang digagas oleh Tiga Serangkai, yaitu Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara. Partai ini menjadi salah satu organisasi politik pertama yang secara terbuka menyuarakan kemerdekaan Hindia Belanda dan memperkenalkan istilah "Indonesia" sebagai identitas politik. Meskipun berumur pendek akibat represi kolonial, Indische Partij meletakkan fondasi penting bagi lahirnya nasionalisme modern.

Sementara itu, ketidakpuasan sosial-ekonomi kaum buruh dan petani membuka jalan bagi masuknya ideologi kiri. Tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet, mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada tahun 1914 sebagai wadah penyebaran sosialisme dan Marxisme. Organisasi ini kemudian menarik tokoh pribumi seperti Semaun dan Darsono, serta menjalin hubungan dengan Sarekat Islam. Perkembangan ISDV semakin radikal setelah Revolusi Rusia 1917, hingga akhirnya bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920, menjadikannya partai komunis pertama di Asia.

Baik Indische Partij maupun PKI sama-sama mencerminkan dinamika pergerakan nasional yang beragam: dari gagasan nasionalisme inklusif hingga perjuangan kelas yang revolusioner. Keduanya menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme tidak hanya lahir dari elite terpelajar, tetapi juga dari kalangan buruh dan rakyat kecil. Dengan demikian, mempelajari sejarah Indische Partij dan ISDV/PKI penting untuk memahami akar ideologi, strategi, serta kontribusi berbagai kelompok dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

METODE

Metode pada artikel ini menggunakan metode studi Pustaka atau studi literatur dengan cara pengumpulan buku-buku dan artikel terkait perlawanan kolonial dari elit ke rakyat: peran Indische Partij dan PKI dalam Sejarah pergerakan Indonesia. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (M. Nazir, 1988). Penelitian studi literatur melibatkan aktivitas membaca, mengumpulkan, mencatat, menyortir, dan mengelola sumber-sumber literatur yang telah diperoleh. Proses pengelolaan ini dilakukan dengan cara menghubungkan berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas (Muhammad & Yosefin, 2021). Penulis lebih menekan kan sumber sekunder pada penulisan artikel untuk lebih memudahkan dalam penelitian mengenai perlawanan kolonial dari elit ke rakyat: peran Indische Partij dan PKI dalam Sejarah pergerakan Indonesia. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik

penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan referensi buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan (Ariyaningsih et al., 2023; Kurniawati et al., 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Munculnya Indische Partij

Kemunculan Indische Partij tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-politik Hindia Belanda yang penuh dengan ketidakadilan dan diskriminasi rasial pada awal abad ke-20. Politik Etis yang secara resmi ditetapkan pada September 1901 melalui pidato Ratu Wilhelmina dipusatkan pada tiga program utama: pembangunan irigasi, penyelenggaraan emigrasi, dan pemberian pendidikan bagi bangsa Indonesia. Meskipun kebijakan ini tidak serta-merta mensejahterakan rakyat, dampak paling menonjolnya adalah program edukasi yang pada akhirnya melahirkan tokoh-tokoh cendekia lokal yang memiliki pemikiran setara dengan bangsa Barat (Susilo & Isbandiyah, 2018). Kelahiran kaum terpelajar inilah yang kemudian menjadi motor penggerak kesadaran nasional, termasuk bagi para pendiri Indische Partij.

Di tengah tumbuhnya kesadaran kaum intelektual pribumi, diskriminasi rasial tetap berlangsung secara sistematis. Latar belakang Indische Partij bermula dari kekecewaan Dr. Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi) terhadap diskriminasi dan ketimpangan status terhadap masyarakat Indonesia asli, masyarakat campuran Indonesia-Eropa, dan Belanda, di mana akses pendidikan, sosial, dan ekonomi hanya berpihak kepada orang-orang Belanda (Susilo & Isbandiyah, 2018). Sebagai seorang Indo (keturunan campuran), Douwes Dekker mengalami diskriminasi dari orang Belanda murni, salah satunya berupa ketidakmampuan golongan Indo untuk menduduki posisi kunci dalam pemerintahan, sementara di posisi yang sama orang Belanda memperoleh gaji yang lebih tinggi daripada pribumi (Utomo, 2014). Kondisi inilah yang mendorong Douwes Dekker untuk memikirkan bentuk perlawanan yang lebih terorganisir dan bersifat politik.

Sebelum mendirikan Indische Partij, Douwes Dekker sempat menggagas organisasi bernama Indische Bond sebagai wadah bagi kaum Indo dan pribumi Hindia Belanda. Namun organisasi tersebut gagal berkembang karena kurangnya dukungan masyarakat. Pada tahun 1912, Douwes Dekker kemudian mengajak Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hadjar Dewantara untuk mendirikan partai sendiri bernama Indische Partij, di mana Cipto dan Suwardi merupakan dua tokoh yang berasal asli dari Indonesia atau pribumi, sehingga terbentuk kerja sama antara kaum Indo dengan kaum bumiputera (Ningsih, 2023). Perpaduan latar belakang ketiga tokoh yang kemudian dikenal sebagai "Tiga Serangkai" ini menjadi fondasi ideologis partai yang bersifat inklusif lintas etnis.

Inspirasi untuk mendirikan sebuah partai politik juga datang dari perkembangan gerakan nasionalis di negara-negara lain. Para intelektual di Hindia Belanda mendapatkan inspirasi dari peristiwa seperti Revolusi Filipina melawan Spanyol dan gerakan kemerdekaan di India, sehingga mereka mulai memahami bahwa kolonialisme bukanlah sistem yang tidak dapat digulingkan dan bahwa perjuangan kolektif dapat membawa perubahan. Media cetak, seperti surat kabar dan pamflet, menjadi alat penting untuk menyebarkan ide-ide nasionalisme dan memperjuangkan kesetaraan (Ningsih, 2023; Utomo, 2014).

Gagasan nasionalisme dan kebangsaan awal Indonesia yang dicetuskan oleh Tiga Serangkai dalam Indische Partij, meskipun usia partai ini singkat, memberikan pondasi dasar terhadap gagasan Indonesia. Gagasan mereka tentang bangsa pada masanya telah melampaui

pemikiran politik zaman itu, bahkan pemakaian istilah "Indonesia" adalah kata yang dipopulerkan pertama kali secara politik oleh pemikir dalam kelompok ini (Utomo, 2014). Dalam konteks gerakan non-kooperatif, Indische Partij muncul sebagai kekuatan yang mencoba memperjuangkan hak-hak politik dan sosial untuk kaum pribumi Hindia Belanda, dengan menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial demi menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesetaraan dan kebebasan (Simarmata et al., 2024). Dengan demikian, Indische Partij yang resmi berdiri pada 25 Desember 1912 di Bandung merupakan buah dari akumulasi ketidakpuasan terhadap diskriminasi kolonial, tumbuhnya kesadaran intelektual akibat Politik Etis, dan pengaruh gerakan nasionalis internasional.

Perkembangan Dan Kemunduran Indische Partij

Indische Partij merupakan salah satu organisasi politik pertama di Hindia Belanda yang secara terbuka menyuarakan gagasan kemerdekaan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh tiga tokoh yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai, yaitu E.F.E. Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara.

Sejak awal berdirinya, Indische Partij berkembang cukup cepat karena memiliki gagasan yang berbeda dibanding organisasi sebelumnya. Jika organisasi seperti Budi Utomo lebih fokus pada bidang pendidikan dan kebudayaan, Indische Partij justru secara terbuka bergerak di bidang politik dan menentang kolonialisme Belanda.

Perkembangan Indische Partij juga terlihat dari beberapa hal berikut:

1. Menyebarkan ide nasionalisme. Indische Partij menjadi organisasi yang mulai memperkenalkan gagasan bahwa Hindia Belanda harus menjadi negara merdeka bagi semua penduduknya tanpa membedakan ras, baik pribumi, Indo-Eropa, maupun kelompok lainnya.
2. Penggunaan media untuk propaganda politik. Para tokohnya aktif menulis artikel dan kritik terhadap pemerintah kolonial melalui surat kabar. Salah satu tulisan yang terkenal adalah artikel berjudul "Als Ik Een Nederlander Was" (Seandainya Aku Seorang Belanda) yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Tulisan ini mengkritik rencana perayaan kemerdekaan Belanda di tanah jajahan.
3. Menarik perhatian masyarakat luas. Dalam waktu singkat organisasi ini berhasil menarik simpati masyarakat, terutama kalangan terpelajar yang mulai menyadari pentingnya persatuan dalam melawan kolonialisme.

Meskipun jumlah anggotanya tidak terlalu besar, pengaruh pemikiran Indische Partij cukup luas karena berani menyampaikan kritik secara terbuka terhadap pemerintah kolonial.

Perkembangan Indische Partij tidak berlangsung lama. Pemerintah kolonial Belanda menganggap organisasi ini berbahaya karena secara terang-terangan menyebarkan gagasan kemerdekaan dan menentang kekuasaan kolonial. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Indische Partij antara lain:

1. Penolakan pengesahan organisasi oleh pemerintah kolonial. Pemerintah Hindia Belanda menolak memberikan status badan hukum kepada Indische Partij karena dianggap dapat mengancam stabilitas kekuasaan kolonial.
2. Pengasingan para pemimpin Indische Partij. Setelah muncul kritik tajam terhadap pemerintah kolonial, terutama melalui tulisan Ki Hajar Dewantara, pemerintah Belanda mengambil tindakan tegas dengan mengasingkan para tokoh utama organisasi ini. E.F.E. Douwes Dekker diasingkan ke Kupang, kemudian ke Belanda; Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Banda Neira; dan Ki Hajar Dewantara juga diasingkan ke Belanda.

3. Pembubaran organisasi oleh pemerintah kolonial. Setelah para pemimpinnya diasingkan, aktivitas Indische Partij semakin melemah hingga akhirnya organisasi ini tidak dapat melanjutkan kegiatannya secara aktif.

Meskipun mengalami kemunduran dan tidak bertahan lama, Indische Partij memiliki peran penting dalam sejarah pergerakan nasional. Organisasi ini menjadi pelopor gerakan politik yang secara jelas menyuarakan kemerdekaan serta menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan masyarakat Hindia Belanda.

Latar Belakang Munculnya ISDV Dan Perubahan Ke PKI

Lahirnya Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Pada masa tersebut, sistem kolonial yang diterapkan oleh pemerintah Belanda menimbulkan kesenjangan sosial yang sangat besar antara penguasa kolonial dengan masyarakat pribumi. Kaum buruh dan petani menjadi kelompok yang paling merasakan dampak eksploitasi ekonomi, seperti upah rendah, kerja berat, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan dan membuka peluang berkembangnya ideologi yang menawarkan keadilan sosial, seperti sosialisme dan komunisme. Kondisi sosial-ekonomi yang buruk tersebut menjadi faktor penting yang melatarbelakangi munculnya gerakan kiri di Hindia Belanda (Simanjuntak dkk., 2025).

Selain faktor internal, munculnya ISDV juga dipengaruhi oleh perkembangan ideologi politik di dunia, khususnya di Eropa. Pada awal abad ke-20, ideologi sosialisme dan Marxisme berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai gerakan buruh internasional. Ideologi ini kemudian dibawa ke Hindia Belanda oleh tokoh sosialis Belanda bernama Henk Sneevliet, yang datang ke Indonesia dan aktif dalam gerakan buruh. Dengan pengalaman organisasinya dalam gerakan sosialis di Belanda, Sneevliet berusaha memperkenalkan gagasan Marxis kepada kaum buruh dan intelektual di Hindia Belanda. Pada tanggal 9 Mei 1914, ia bersama beberapa tokoh sosialis Belanda mendirikan organisasi Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) sebagai wadah penyebaran ideologi sosialisme dan Marxisme di wilayah kolonial tersebut (Hasan, 2014).

Pada awal berdirinya, anggota ISDV sebagian besar berasal dari kalangan sosialis Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Jumlah anggota pribumi masih sangat sedikit, sehingga organisasi ini pada mulanya lebih merupakan organisasi politik kaum Eropa. Namun seiring perkembangan waktu, ISDV mulai berusaha menarik dukungan dari masyarakat pribumi dengan mendekati organisasi pergerakan yang sudah memiliki basis massa besar, terutama Sarekat Islam. Melalui strategi ini, beberapa tokoh pribumi seperti Semaun dan Darsono kemudian terpengaruh oleh gagasan sosialisme yang dibawa oleh ISDV. Hal ini membuat organisasi tersebut mulai berkembang dan memperoleh dukungan dari kalangan buruh serta anggota Sarekat Islam yang bersifat radikal (Pramartha, 2022).

ISDV juga aktif mengorganisasi gerakan buruh melalui serikat pekerja dan propaganda politik. Organisasi ini berperan dalam membangun kesadaran kelas di kalangan buruh serta mendorong perlawanan terhadap sistem kolonial yang dianggap menindas. Aktivitas tersebut membuat ISDV semakin berpengaruh dalam gerakan politik di Hindia Belanda, terutama di pusat-pusat industri seperti Semarang yang memiliki banyak pekerja kereta api dan trem. Melalui kegiatan organisasi, pendidikan politik, serta penerbitan media propaganda, ISDV berhasil memperluas pengaruh ideologi Marxis di kalangan masyarakat pekerja (Simanjuntak dkk., 2025).

Perkembangan gerakan kiri di Hindia Belanda semakin menguat setelah terjadinya Revolusi Rusia tahun 1917 yang berhasil membawa kaum Bolshevik berkuasa. Peristiwa ini memberikan inspirasi bagi kelompok sosialis di berbagai negara, termasuk di Hindia Belanda, untuk membangun gerakan revolusioner. Dalam konteks tersebut, ISDV mulai bergerak ke arah organisasi politik yang lebih radikal dan secara aktif mendorong perjuangan kelas melawan sistem kapitalisme dan kolonialisme. Pengaruh ideologi komunisme yang semakin kuat akhirnya mendorong ISDV melakukan reorganisasi dan perubahan arah perjuangan politiknya.

Pada tahun 1920, ISDV secara resmi berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Perubahan ini menandai transformasi organisasi dari perkumpulan sosialis menjadi partai politik komunis yang berorientasi pada perjuangan revolusioner. Dalam struktur kepemimpinan baru, Semaun menjadi ketua dan Darsono sebagai wakil ketua. Dengan perubahan tersebut, PKI menjadi salah satu partai politik modern pertama di Indonesia yang memiliki ideologi jelas dan basis massa di kalangan buruh dan rakyat kecil (Pramartha, 2022).

Kemunculan ISDV dan perubahannya menjadi PKI merupakan bagian dari dinamika pergerakan politik di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Faktor utama yang melatarbelakanginya adalah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tertindas oleh sistem kolonial, masuknya pengaruh ideologi sosialisme dari Eropa, serta berkembangnya gerakan buruh yang menuntut keadilan sosial. Proses transformasi dari ISDV menjadi PKI menunjukkan bagaimana ideologi dan organisasi politik internasional dapat beradaptasi dengan kondisi lokal dan menjadi bagian dari sejarah pergerakan nasional Indonesia.

Perkembangan Dan Kontribusi PKI Pada Masa Pergerakan

PKI berawal dari *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV) yang didirikan oleh Henk Sneevliet pada tahun 1914. ISDV awalnya merupakan wadah kaum sosialis Belanda, namun segera menarik simpati kaum pribumi yang mulai sadar akan ketidakadilan kolonial. Pada tahun 1920, ISDV bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI), menjadikannya partai komunis pertama di Asia. Perkembangan awal PKI ditandai dengan masuknya tokoh pribumi seperti Semaun, Darsono, Alimin, dan Musso, yang memperluas basis massa ke kalangan buruh perkebunan, pelabuhan, dan pegawai kereta api (Fadillah, 2020).

Pada periode 1920–1925, PKI berkembang pesat dengan membangun jaringan organisasi buruh dan tani, serta aktif menyebarkan ideologi sosialisme melalui surat kabar dan kursus politik. Kontribusi utamanya adalah membangun kesadaran kelas di kalangan rakyat kecil, yang sebelumnya jarang terlibat dalam politik formal. PKI juga menjadi pelopor dalam mobilisasi massa buruh, mengorganisir pemogokan besar di sektor perkebunan dan transportasi sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial (Utomo, 2016).

Puncak perkembangan PKI pada masa pergerakan terjadi dengan pemberontakan 1926–1927, yang dipimpin oleh tokoh seperti Alimin dan Musso. Meskipun pemberontakan ini gagal dan berujung pada represi besar-besaran, peristiwa tersebut menunjukkan keberanian PKI dalam menantang kekuasaan kolonial secara langsung. Kontribusi PKI dalam fase ini adalah memperkenalkan tradisi perlawanan radikal yang memperluas cakrawala perjuangan nasional dari sekadar reformasi menuju revolusi sosial-politik (Soedarmo & Ginanjar, 2019).

Kontribusi PKI pada masa pergerakan merupakan sesuatu yang sangat besar dan cukup berpengaruh untuk Indonesia, yaitu:

1. Mobilisasi Buruh dan Tani. PKI berhasil membangun jaringan massa yang luas, terutama di sektor perkebunan dan transportasi. Pemogokan buruh yang mereka organisir menjadi salah satu bentuk perlawanan nyata terhadap sistem kolonial (Fadillah, 2020).

2. Pendidikan Politik Rakyat. PKI aktif menerjemahkan literatur sosialis, mengadakan kursus politik, dan membangun kesadaran kelas di kalangan buruh serta tani. Hal ini memperkuat pemahaman rakyat tentang ketidakadilan kolonial dan pentingnya perjuangan kolektif (McVey, 1965).
3. Perlawanan Anti-Kolonial. Puncak kontribusi PKI pada masa pergerakan terlihat dalam pemberontakan 1926–1927. Meskipun gagal, peristiwa ini menunjukkan keberanian PKI dalam menantang kekuasaan kolonial secara langsung (Utomo, 2016).
4. Penguatan Tradisi Radikal dalam Pergerakan Nasional. PKI memperkenalkan ideologi alternatif yang menekankan solidaritas internasionalisme proletar, sehingga memperluas cakrawala perjuangan nasional Indonesia (Soedarmo & Ginanjar, 2019).

Meskipun mengalami represi keras setelah pemberontakan 1926-1927, PKI tetap memberikan kontribusi besar dalam membentuk kesadaran politik rakyat, memperluas basis sosial pergerakan, dan memperkenalkan ideologi anti-kolonial yang memperkuat semangat perjuangan kemerdekaan.

Kemunduran PKI Pada Masa Pergerakan Nasional

Partai Komunis Indonesia (PKI) mengalami perkembangan yang cukup pesat pada masa pergerakan nasional, terutama melalui pengaruhnya dalam organisasi buruh di Semarang. PKI memanfaatkan organisasi buruh sebagai sarana perjuangan melawan kapitalisme dan pemerintah kolonial Belanda. Tokoh-tokoh seperti Semaoen dan Sneevliet berperan besar dalam menyebarkan paham Marxisme di kalangan buruh dan membangun gerakan revolusioner melalui organisasi-organisasi buruh seperti VSTP (Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel) dan organisasi buruh pelabuhan. (Novita, 2015: 4).

Perkembangan PKI semakin kuat ketika organisasi buruh mulai aktif melakukan aksi pemogokan besar sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kolonial dan kaum kapitalis. Pemogokan besar yang terjadi pada tahun 1923 oleh buruh kereta api dan tahun 1925 oleh buruh pelabuhan Semarang menunjukkan besarnya pengaruh PKI terhadap gerakan buruh saat itu. Pemogokan tersebut melibatkan ribuan buruh dan berdampak luas terhadap kondisi ekonomi serta politik di Hindia Belanda (Novita, 2015: 5).

Namun, perkembangan PKI mulai mengalami kemunduran setelah pemerintah kolonial Belanda memandang gerakan tersebut sebagai ancaman besar terhadap kekuasaan mereka. Pemerintah kolonial menilai bahwa PKI telah menghasut kaum buruh untuk melakukan pemberontakan dan aksi revolusioner. Oleh karena itu, pemerintah mulai melakukan pengawasan ketat terhadap organisasi-organisasi buruh yang berhubungan dengan PKI (Novita, 2015: 5).

Kemunduran PKI semakin nyata setelah terjadinya pemberontakan komunis pada tahun 1926-1927. Pemberontakan tersebut gagal dan justru mengakibatkan tindakan represif dari pemerintah kolonial Belanda. PKI kemudian dinyatakan sebagai partai terlarang, sedangkan para pemimpinnya banyak yang ditangkap, dipenjara, atau dibuang ke Boven Digul di Papua. Kondisi ini menyebabkan organisasi-organisasi buruh yang sebelumnya berada di bawah pengaruh PKI ikut mengalami kemunduran (Novita, 2015: 2).

Selain itu, pengasingan tokoh-tokoh penting seperti Semaoen semakin memperlemah gerakan PKI dan organisasi buruh di Semarang. Aktivitas organisasi buruh menjadi semakin terbatas karena pemerintah kolonial hanya memberikan ruang gerak kepada organisasi yang tidak terlibat dalam politik maupun aksi perlawanan. Akibatnya, pergerakan buruh yang sebelumnya aktif menjadi melemah dan tidak lagi mampu melakukan aksi besar seperti sebelumnya (Novita, 2015: 6). Kemunduran PKI pada masa pergerakan nasional disebabkan oleh kegagalan

pemberontakan tahun 1926-1927, tindakan represif pemerintah kolonial Belanda, penangkapan dan pengasingan para pemimpin PKI, serta melemahnya organisasi buruh yang menjadi basis utama kekuatan PKI pada masa itu.

KESIMPULAN

Sejarah pergerakan nasional Indonesia pada awal abad ke-20 memperlihatkan dinamika yang kompleks dengan hadirnya berbagai organisasi politik yang memiliki ideologi dan strategi berbeda. Indische Partij, yang lahir pada tahun 1912, menjadi tonggak awal gerakan politik modern dengan gagasan nasionalisme inklusif dan keberanian menyuarakan kemerdekaan secara terbuka. Meskipun berumur pendek akibat represi kolonial, partai ini berhasil menanamkan kesadaran kebangsaan dan memperkenalkan istilah "Indonesia" sebagai identitas politik. Sementara itu, ISDV yang didirikan pada tahun 1914 oleh Henk Sneevliet membawa pengaruh sosialisme dan Marxisme ke Hindia Belanda. Transformasinya menjadi PKI pada tahun 1920 menandai masuknya gerakan kiri dalam pergerakan nasional, dengan basis massa buruh dan tani. PKI berkontribusi besar melalui mobilisasi buruh, pendidikan politik rakyat, serta perlawanan anti-kolonial, yang berpuncak pada pemberontakan 1926-1927. Walaupun pemberontakan tersebut gagal dan berujung pada represi keras, PKI tetap meninggalkan warisan penting berupa tradisi perlawanan radikal dan kesadaran kelas dalam perjuangan kemerdekaan. Indische Partij dan PKI sama-sama menunjukkan bahwa perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia merupakan hasil akumulasi berbagai ideologi, lapisan sosial, dan strategi politik. Keduanya memperlihatkan bahwa pergerakan nasional tidak hanya lahir dari kalangan elite terpelajar, tetapi juga dari rakyat kecil yang tertindas oleh sistem kolonial. Sejarah keduanya menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan kolektif yang beragam, berani, dan penuh pengorbanan.

DAFTAR PUSTAKA

Efendi, D., dkk. (2021). Dinamika propaganda PKI 1914–1948: Cikal bakal gerakan komunis di Indonesia. Estoria: Journal of Social Science and Humanities. https://journal.unindra.ac.id/index.php/estoria/article/view/3940

Ningsih, S. (2023). Kontribusi gagasan kritis dari Tiga Serangkai dalam mewujudkan nasionalisme Indonesia (1912–1914). Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah, 2(3), 47–55.

Novita, Angghi. (2015). Gerakan Sarekat Buruh Semarang Tahun 1913–1925. Journal of Indonesian History, 3(2), 1–7.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2019). Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.

Pramartha, I. N. B. (2022). Politik kiri prakemerdekaan di Hindia Belanda tahun 1914–1927. Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial, 5(2). https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/nirwasita/article/view/1818

Simanjuntak, J. V., dkk. (2025). Peran ISDV dalam membentuk identitas politik kaum buruh di masa kolonial. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/28056/14470

Simarmata, R. A., Viola, & Sinaga, R. (2024). Peran Indische Partij sebagai gerakan non-kooperatif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif, 8(5), 92–98.

Soedarmo, R., & Ginanjar. (2019). Perkembangan politik Partai Komunis Indonesia (1948–1965). Jurnal Sejarah dan Politik Indonesia, 12(2), 45–67.

Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis dan pengaruhnya bagi lahirnya pergerakan bangsa Indonesia. HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 6(2), 403–416.

Utomo, S. P. (2016). Suara "Merah" Ibu Kota: Geliat politik Partai Komunis Indonesia Comite Djakarta Raya. Jurnal Universitas Gadjah Mada, 12(1), 59–72.

Utomo, W. S. (2014). Nasionalisme dan gagasan kebangsaan Indonesia awal: Pemikiran Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkusumo dan Douwes Dekker 1912–1914. Lembaran Sejarah, 11(1), 51–69.